



## Pengembangan masyarakat berbasis Gender: Analisis Program Dana Desa dan Program Keluarga Harapan

Alfrojems<sup>1\*</sup>, Chairani<sup>2</sup>, Triyanti Anugrahini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

\* Corresponding Author. E-mail: [alfrojems@gmail.com](mailto:alfrojems@gmail.com)

Received: 2 Okt 2022.; Revised: 30 Nov 2022; Accepted: 22 Des 2022

**Abstract:** *The purpose of this research is to examine gender issues in community development efforts through poverty alleviation programs, particularly the Village Fund and the Conditional Cash Transfer (PKH) program. The method employed in this writing is a literature review. Data collection was carried out by gathering journals, reports, books, and documents relevant to the research objectives. Based on the findings of the review, it is evident that gender-related problems in poverty alleviation efforts are not limited to within the community; they also extend to the implementation of gender concepts within government programs. This can be observed in the two aspects discussed in this paper: gender in community development and gender in government programs. The recommendations derived from this study that need to be implemented include the necessity for policy reviews, policy adjustments, capacity building for facilitators, the development of gender-related instruments, the promotion of collaborations with universities, and the encouragement of more publications relevant to gender issues.*

**Keywords:** *Gender, Poverty Alleviation, Community Development, PKH*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini mengkaji isu gender dalam upaya pengembangan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan khususnya pada program Dana Desa dan PKH. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data berupa jurnal, laporan, buku, dan dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil pengkajian maka diperoleh bahwa persoalan gender dalam upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya terjadi di tengah masyarakat, bahkan juga pada implementasi konsep gender pada program pemerintah, hal ini dapat dilihat pada dua aspek pembahasan penulisan ini yakni gender pada pengembangan masyarakat dan gender dalam program pemerintah. Adapun rekomendasi dari penelitian ini yang perlu untuk dilaksanakan adalah perlunya upaya untuk melakukan reviu kebijakan, penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas terhadap pendamping, penyusunan instrumen terkait dengan gender, mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi, dan mendorong untuk semakin banyaknya publikasi yang relevan dengan isu gender

**Kata Kunci:** Gender, Pengentasan Kemiskinan, Pengembangan Masyarakat, PKH



## PENDAHULUAN

Tahun 2019 diperingati sebagai satu dekade reformasi kesetaraan gender dunia. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bank Dunia diperoleh gambaran informasi bahwa rata-rata nilai global kesetaraan gender saat ini mencapai 74.71 ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan nilai 10 tahun yang lalu yang hanya mencapai 70.06, merujuk pada data atau angka tersebut maka dapat diperoleh informasi bahwa saat ini baru tiga per-empat perempuan di dunia yang memperoleh kesempatan yang sama dengan pria, Indonesia sendiri memiliki angka 64,38 (Rahmawati et al., 2019).

Membahas kemiskinan tentu tidak akan lengkap tanpa adanya pendekatan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan fakta yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kondisi kemiskinan yang cukup memiliki perbedaan sehingga dengan demikian antara laki-laki dan perempuan memiliki cara yang berbeda juga untuk terlepas dari kemiskinan, ini pun didasari oleh adanya ketimpangan atau kesenjangan yang cukup dalam antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses segala kesempatan untuk keluar dari kemiskinan (Indraswari, 2009). Bahkan seriusnya isu gender dalam kemiskinan menyebabkan World Bank menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi yang akhirnya menyebabkan terjadinya kemiskinan yakni *women's lack of empowerment, opportunity, capacity and security* "kurangnya pemberdayaan, kesempatan, kapasitas dan keamanan bagi perempuan" (World Bank, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kemiskinan salah satu diantaranya adalah karena adanya kondisi dimana perempuan kehilangan kesempatan untuk memberdayakan diri yang akhirnya menyebabkan kebanyakan perempuan memiliki ketergantungan pada laki-laki, seperti adanya ketergantungan secara materi oleh istri kepada suami. Padahal di sisi lain jumlah penduduk perempuan sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki, hal ini tentu akan menyebabkan kontribusi secara kuantitas secara kolektif atas jumlah penduduk miskin bukan hanya nasional bahkan dunia.

Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang saat ini masuk dalam kelompok negara berkembang bahkan menjadi salah satu dengan pertumbuhan ekonomi salah satu yang tercepat di dunia, ternyata masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak khususnya dalam isu gender. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun (2019) indeks pembangunan manusia Indonesia antara laki-laki dan perempuan memiliki angka yang cukup jauh kesenjangannya, dimana untuk laki-laki nilai IPMnya mencapai 75.96

sedangkan perempuan nilainya hanya 69.18 Melalui angka ini jelas tergambar secara mudah bahwa Indonesia masih memiliki persoalan khususnya pada kesetaraan akses pembangunan untuk perempuan dan laki-laki. Tidak heran juga dimana apabila melihat data kemiskinan Indonesia maka perempuan masih menjadi kelompok jenis kelamin dengan kontribusi paling besar yakni 10.06% (Statistik, 2018), ini tentu cukup kontradiktif dimana jumlah penduduk paling banyak menurut BPS berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki dengan jumlah mencapai 135.821.768 (Nugraheny, 2019). Kondisi yang dihadapi oleh kelompok perempuan ternyata tidak sebanding lurus dengan moto nasional yakni *bhinneka tunggal ika* yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Sehingga apabila keberagaman dihubungkan dengan pembangunan maka perempuan masih harus menjadi kelompok nomor dua dalam hal akses pembangunan, hal ini kemudian menyebabkan kurangnya atau rendahnya kemampuan perempuan untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Gender secara sederhana dapat dimaknai sebagai peran atau perilaku yang ditampilkan oleh seseorang yang kemudian dikaitkan dengan jenis kelaminnya (Nainggolan, 2019a). Di sisi lain sesungguhnya gender merupakan elemen dasar dari konsep diri kita. Mengetahui bahwa “aku adalah Perempuan” atau “aku adalah pria” adalah bagian dari inti identitas personal kita. Dalam studi gender kita selalu mendengar istilah feminitas, dan maskulinitas dimana hal inilah yang akan menjadi stribut dari setiap personal, dan terdapat model dua dimensi maskulinitas dan feminitas psikologis sebagaimana pada gambar 1 berikut,



Gambar 1: Model Dua Dimensi Maskulinitas dan Feminitas Psikologi (Taylor et al., 2009)

Menurut Martin dan Ruble (Taylor et al., 2009) Orang sering memandang dirinya memiliki minat dan kepribadian yang sesuai dengan gendernya. Perspektif kognitif sangat berguna untuk memahami bagaimana belajar tentang gender. Pengetahuan bahwa kita adalah pria atau Perempuan, pemahaman tentang gender identity (identitas gender), telah kita peroleh sejak usia 2 (dua) tahun, anak telah menyadari gendernya dan dapat memberi tahu bahwa mereka adalah perempuan atau laki-laki.

Semua stereotip selalu berhubungan dengan gender hal ini mengacu pada kekhasan setiap anggota kategori. Menurut penganut paham feminisme Stereotip gender merupakan kategori yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Banyak stereotip bersifat begitu umum sehingga menjadi ambigu, dan ini berlaku untuk stereotip gender. Pertimbangan kategori “maskulin” atau “feminisme”. Contohnya paling mudah dapat dilihat dari program pemberdayaan kelompok dimana sangat didominasi oleh perempuan karena dianggap perempuan lebih dinamis dan tidak kaku jika dibandingkan dengan laki-laki. Jelas kondisi ini berpotensi untuk dapat memperdalam jurang kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari ketidakadilan gender adalah kemiskinan, dimana ketidakmampuan perempuan untuk dapat mengakses sebuah program atau aktivitas yang dapat mengembangkan dirinya menjadinya banyak perempuan yang kemudian hidup dalam kemiskinan (SMERU, 2005). Menurut Bank Dunia sampai tahun 2018, 736 juta orang di seluruh dunia masih hidup di bawah kemiskinan ekstrem, ukuran kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran kurang dari 1,90 dolar AS per hari, yang artinya kurang 10% penduduk dunia merupakan masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem dan 413 juta diantaranya menderita kemiskinan berat (Pusparisa, 2019).

Dewasa ini upaya pengentasan kemiskinan menuntut penanganan yang holistik, oleh karena itu masyarakat bukan hanya diberikan upaya peningkatan ekonomi, namun juga diikuti dengan peningkatan bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan kebudayaan keseluruhan hal tersebut dibalut dalam proses pengembangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun saat ini isu pembangunan juga memiliki tema yang menarik yakni inklusifitas dimana hal ini berarti bahwa pembangunan melibatkan seluruh pihak tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan atau bahkan gender yang lebih dikenal dengan gender mainstreaming. Hal ini kemudian mendorong beberapa program nasional untuk dapat ikut terlibat dalam upaya penyelesaian isu gender atau gender

mainstreaming / pengarusutamaan gender. Kondisi ini terjadi karena perlunya distribusi pembangunan yang merata sehingga diperlukan dukungan perspektif ini karena relevan dengan pembangunan inklusif.

Saat ini Indonesia seolah mengupayakan program menuju pembangunan yang inklusif, ini artinya program yang diselenggarakan merupakan upaya untuk membangun masyarakat Indonesia secara adil dan salah satunya adalah tanpa memerhatikan jenis kelamin. Melalui pembangunan yang inklusif diharapkan kesenjangan masyarakat dapat segera diatasi. Selain itu juga pembangunan inklusif berarti sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menikmati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat tanpa melihat dari golongan mana pun, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu, dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi partisipasi aktif dan semakin lengkap partisipasinya maka semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan. Lebih jauh saat ini pembangunan baik nasional maupun internasional berpatokan pada isu inklusifitas yang artinya adalah pembangunan tersebut bukan hanya mewujudkan kondisi ekonomi yang baik bagi masyarakat melainkan juga mampu untuk menciptakan pembangunan yang adil bagi seluruh bagian atau elemen masyarakat, hal ini berarti pembangunan tersebut mampu untuk diciptakan dan dinikmati oleh seluruh bagian dari masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif maka seyogyanya hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah bagaimana menjamin tersedianya hak yang sama bagi seluruh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan, hal inilah yang kemudian kita kenal dengan gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender. Poin ini adalah menekankan kepada keterlibatan secara adil oleh seluruh bagian masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan, hal inilah kemudian akan terlaksana secara baik apabila gender stereotip atau keyakinan tentang atribut khas pria dan perempuan pada masyarakat setempat rendah.

Berbicara tentang gender stereotip maka kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana seperti; Bagaimana jenis kelamin seseorang mempengaruhi persepsi dan evaluasi kita terhadap orang itu atau perilakunya? Penekanannya disini adalah pada gender sebagai karakteristik dari target pembentukan kesan.

Hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa keterlibatan komunitas perempuan terhadap gentrifikasi menunjukkan pentingnya hubungan kepercayaan dan mutualitas yang sudah ada di antara teman dan tetangga (Texier, 2006). Keprihatinan bersama tentang perumahan dan perpindahan, dan batas-batas komunitas dan identitas kolektif, berfungsi untuk memobilisasi warga. Mereka memperkuat politisasi penduduk barrio dan mengurangi biaya partisipasi. Pada gilirannya, mereka dapat mengkatalisasi kegiatan politik yang lebih formal karena kompetensi dan perasaan kemandirian politik tumbuh. Kewarganegaraan aktif dapat dihasilkan dari 'non-warga negara' (individu tidak berdokumen) dan 'warga kelas dua' (individu yang dikecualikan). Melalui berbagai argumentasi dan data yang bersifat evidence di atas maka memberikan motivasi kepada penulis untuk menyusun sebuah penulisan ini dengan tujuan untuk mengkaji isu gender dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun jenis pengumpulan data berupa kajian literatur atau studi dokumentasi. Kajian literatur merupakan sebuah upaya yang digunakan oleh peneliti untuk dapat menemukan sekaligus menginspirasi secara teoritis atau konsep dari fokus yang ditelaah untuk menentukan sub-kategori atau unit analisis (Satori & Komariah, 2014) Melalui pendekatan ini penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berbasis kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji tentang permasalahan isu gender dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi berupa pengumpulan data yang bersifat *secondary data* berupa dokumen berupa jurnal, buku, laporan, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini yakni permasalahan isu gender. Penelitian ini dalam prosesnya mengambil tiga kajian hasil

penelitian sebagai data utama, 9 (sembilan) buku dan dokumen, serta 13 (tiga belas) jurnal sebagai data penunjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Gender pada pengentasan kemiskinan berbasis pengembangan masyarakat**

Isu gender dalam pembangunan sesungguhnya bukanlah isu baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa isu gender menjadi perhatian lebih dalam pembangunan atau proses pengembangan masyarakat. salah satu penelitian yang sering menjadi perhatian adalah *gender and Development* (GAD). GAD lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam pembangunan, selain itu GAD juga memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut GAD berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil (Hasim & Remiswai, 2009). Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa situasi inilah yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi jenuh perempuan (Hasim & Remiswai, 2009). Lebih lanjut jauh dikatakan dari sudut pandang GAD bahwa kesetaraan gender harus diupayakan pada aspek yang substansial berikut ini: (1). Pemberian akses yang sama dalam Pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan; (2). Pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia; (3). Memberikan kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji yang sama, serta pendistribusian aset yang sama; dan (4). Pemberian akses yang sama pula dibidang politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan (Hasim & Remiswai, 2009). Dari penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa sesungguhnya terkait dengan isu gender dalam pembangunan adalah terkait dengan kesempatan mengakses program pengembangan masyarakat atau ikut berkontribusi pada proses tersebut, akan tetapi hal ini seolah sulit karena masih rendahnya pemahaman masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan atas konsep dasar pengembangan masyarakat dan hak kesamaan untuk mengakses program tersebut. Hal ini semakin diperparah dengan adanya nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang terlanjur dipercayai oleh masyarakat dan bahkan masih terus dipelihara terkait dengan pengklasifikasian atau pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak memberikan hak atau kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan pengembangan masyarakat yang ada. Bahkan adanya kecenderungan

dimana nilai yang dipahami oleh masyarakat ini, lebih condong untuk merugikan perempuan khususnya dalam ikut berpartisipasi pada kesempatan pengembangan masyarakat tersebut. lebih lanjut ditambahkan juga sekalipun pendekatan ataupun perspektif gender telah diupayakan untuk disebarkan ke seluruh dunia akan tetapi partisipasi perempuan terhadap pembangunan masyarakat masih belum terlalu menunjukkan hal yang signifikan, kondisi ini bahkan terjadi dari tahapan pembuatan program atau kebijakan sampai ke hal teknis di lapangan. Padahal proses pengembangan masyarakat penting dalam untuk mendorong kesadaran bersama dalam aspek partisipasi yang setara. Beberapa contoh yang mudah dilihat adalah perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki pada keterwakilan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi kunci utama dalam hal pembuatan kebijakan khususnya terkait dengan pembangunan masyarakat, dimana rasio perempuan baru mencapai 21% (Kompas, 2019), selain itu dari segi teknis dari 78.000 desa Indonesia kepala desa perempuan hanya sebesar 5% (Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2017).

Selanjutnya menurut Melly G. Tan (1996) (Hasim & Remiswai, 2009) terdapat beberapa hambatan yang mendasar sehingga menyebabkan perempuan terhalangi dalam berpartisipasi selama proses pembangunan, seperti: (1). Hambatan fisik; (2). Hambatan teologis, dimana dianggap perempuan sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki; (3). Hambatan sosial-budaya; (4). Hambatan sikap pandang; dan (5). Hambatan historis. Lebih lanjut lagi Indraswari (2009) menyebutkan bahwa dampak dari adanya stereotip gender pada perempuan menyebabkan terbatasnya pemberdayaan pada perempuan, terbatasnya kesempatan perempuan, terbatasnya kapasitas perempuan, dan terbatasnya keamanan perempuan (Indraswari, 2009). Banyaknya faktor ini tentu memberikan kontribusi pada sulitnya perempuan untuk mengupayakan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan sebuah wilayah sehingga menyebabkan perempuan menjadi pihak paling lemah dan paling sulit untuk memanfaatkan pemberdayaan tersebut.

Sebuah perubahan kepada pelayanan berbasis masyarakat seperti pengembangan masyarakat sesungguhnya dapat memberikan tambahan beban bagi kelompok perempuan secara tidak proporsional, baik karena peran tradisional perempuan sebagai pemelihara tradisional dan juga karena lebih tingginya tingkat partisipasi perempuan itu sendiri dalam proses pengembangan masyarakat (Ife, 2013). Lebih lanjut Ife juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat kontemporer yang sangat dipengaruhi oleh rasionalisme ekonomi,

perawatan dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat tidak dihargai, karena hal ini tidak dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kekayaan atau meningkatkan produktivitas, oleh karena itu dalam layanan berbasis masyarakat diperlukan sebuah upaya strategis yang secara efektif mendorong pengurangan marginalisasi perempuan sekaligus memberikan pembelajaran secara langsung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas tanpa memandang jenis kelamin atau gender.

Melalui berbagai hasil penelitian di atas terlihat dan juga diperoleh informasi secara jelas bahwa pada pelaksanaannya dalam proses pengembangan masyarakat isu gender begitu melekat, hal ini ternyata tidak lepas dari penggunaan nilai-nilai masyarakat yang dianut di wilayah tertentu. Penggunaan nilai yang disertai dengan tingginya juga isu gender terkhusus dengan adanya stereotip pada kelompok gender tertentu, dimana pada kasus ini lebih besar adalah kelompok perempuan menyebabkan praktik pemberdayaan masyarakat yang seyogyanya mampu untuk menjadi jembatan pembangunan sekaligus distribusi pembangunan yang efektif dan efisien memiliki dampak yang tidak sesuai, bahkan semakin memperdalam pemisah antara satu kelompok gender dengan kelompok gender lainnya. Hal ini apabila ditinjau dari hasil penelitian, kelompok gender perempuan menjadi kelompok yang paling merugikan pada pelaksanaannya.

Terkait dengan gender yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat, salah satu konsep yang cukup dikenal luas adalah *women in development (WID)* atau perempuan dalam pembangunan. Secara umum WID didefinisikan sebagai pendekatan dimana proses pengintegrasian perempuan dalam program pembangunan (Hasim & Remiswai, 2009). Menurut Jajat dan Oman (2004) dalam Hasim dan Remiswai (2009) bahwa WID dipengaruhi oleh ideologi *developmentalism* dimana pembangunan merupakan wujud pemikiran modern atau terjadinya modernisasi pemikiran tentang pembangunan di negara-negara seluruh dunia, oleh karena itu pembangunan merupakan sebuah kesatuan dari proses kemauan yang bergerak secara linear dan pasti. Akan tetapi sangat disayangkan dimana dalam proses pembangunan tersebut perempuan masih tetap berada di belakang, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaatan pembangunan dan hal ini lebih disebabkan karena perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti subordinat perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan sosial dan budaya (Hasim dan Remiswai, 2009), oleh karena itu menurut Surya Dharma (2002) (Hasim & Remiswai, 2009) menekankan bahwa pendekatan WID berpijak dari dua

sasaran, yaitu (1). Prinsip egalitarian, kepercayaan bahwa semua orang sederajat; dan (2). Menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi yang dialami oleh perempuan pada sektor produksi. Selain itu juga untuk memperjelas pernyataan sebelumnya Jajat dan Oman (dalam Hasim dan Remiswai, 2009) memaparkan bahwa perlunya untuk merumuskan tiga prinsip utama dalam pembangunan yang terdiri atas: (1). Kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki harus diabadikan sebagai prinsip yang fundamental; (2). Perempuan harus diakui sebagai agen dan pewaris perubahan; dan (3). Model pembangunan baru yang berperspektif gender, yang bertujuan untuk memperluas pilihan bagi perempuan dan laki-laki, namun perbedaan budaya dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Selanjutnya konsep yang cukup populer dalam konteks pembangunan masyarakat dan isu gender adalah *Women and Development* (WAD), dimana pendekatan ini menekankan pada hubungan antara perempuan dan laki-laki pada proses dari pembangunan itu sendiri, lebih lanjut pendekatan WAD dianggap sebagai pendekatan yang lebih kritis, akan tetapi terbentur pada hubungan patriarki yang terjadi dalam corak produksi masyarakat (Hasim & Remiswai, 2009). Oleh karena itu melalui pendekatan ini menekankan pada perlunya dukungan politik yang stabil serta dalam implementasinya juga WAD sepatutnya menitikberatkan pada pengembangan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memerhatikan aspek waktu yang digunakan oleh perempuan (Surya, 2002; (Hasim & Remiswai, 2009).

### **Program Pengentasan kemiskinan dalam Perspektif Gender**

Saat ini terdapat dua program prioritas nasional yang memperoleh perhatian yang lebih dari pemerintah, kedua program itu adalah dana desa dan Program Keluarga Harapan.

#### *Dana Desa*

Secara prinsip pengelolaan dana desa yang cukup akomodatif untuk menunjang partisipasi masyarakat, akan tetapi kenyataannya tidak dijalankan oleh pengurus desa secara keseluruhan. Namun melalui partisipasi perempuan justru mampu untuk menyelenggarakan prinsip tersebut, oleh karena itu partisipasi perempuan dan keterbukaan kepada masyarakat seharusnya menjadi suatu kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa, akan tetapi tidak pernah terjadi. Peranan para perempuan dalam merencanakan

pelaksanaan program-program desa yang disebut dengan APBDesa, dapat menampung aspirasi-aspirasi mereka melalui kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai, norma dan budaya. Melalui semangat peranan perempuan dapat melibatkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa (Darmi, 2016). Hal ini mampu menggambarkan bahwa sifat perempuan yang akomodatif memiliki peran atau fungsi yang cukup kuat dalam meningkatkan dan kemudian semakin memperkuat posisi perempuan dalam upaya pemberdayaan pada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh masyarakat semakin memberikan atau memperkuat posisi perempuan memberikan kesempatan untuk menjadikan hal tersebut sebagai solusi dalam meningkatkan keingintahuan masyarakat pedesaan untuk jauh lebih menyadari isu gender dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih dengan masih tabunya isu gender menurut masyarakat pedesaan (Fauziah et al., 2015).

Pada penelitian lainnya menyebutkan pengelolaan Dana Desa secara prinsipnya adalah terbuka dan mengakomodasi semua partisipasi masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh pengelola dana desa tersebut. Partisipasi perempuan dan keterbukaan kepada masyarakat seharusnya menjadi suatu kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa akan tetapi tidak pernah terjadi. Peranan para perempuan dalam merencanakan pelaksanaan program-program desa yang disebut dengan APBDesa, dapat menampung aspirasi-aspirasi mereka melalui kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai, norma dan budaya (Darmi, 2016).

Pada hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa terdapat harapan yang cukup tinggi untuk perempuan mampu memanfaatkan nilai-nilai gotong royong yang ada di tengah masyarakat sebagai peluang untuk dapat memberikan tempat kepada kelompok gender perempuan agar mampu menyeimbangi peran dan fungsi dari kelompok gender laki-laki sehingga tujuan distribusi dari pembangunan yang merata dapat terwujud. Pada pelaksanaannya peran dan kontribusi perempuan yang cukup baik dalam menangkap aspirasi tidak cukup bagi masyarakat untuk dapat melibatkan perempuan secara aktif dalam sebuah struktur, karena pada kenyataannya kemampuan perempuan hanya dilibatkan secara *temporary* pada situasi dan kondisi tertentu, namun aktor utama dari pelaksanaannya masih sangat didominasi oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kualitas kontribusi perempuan dalam berbagai aspek ditingkat desa sudah cukup baik namun yang sampai saat ini jumlahnya masih tergolong

kurang terlebih dalam hal keterwakilan perempuan sebagai aparat desa (Wula & Anggraini, 2022).

Saat ini peran perempuan di tingkat perdesaan cukup menghadapi permasalahan khususnya terkait dengan dilema pada masyarakat terkait dengan kedudukan perempuan pada setiap kegiatan masyarakat (Putri et al., 2017). Hasil penelitian ini tentu sangat relevan dengan kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat yang sudah bertahan cukup lama. Kondisi ini seolah memberikan kondisi terbatasnya ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi di tengah masyarakat karena memiliki tanggung jawab hanya untuk urusan keluarga. Hasil penelitian yang diperoleh tersebut menggambarkan secara jelas bahwa pada pelaksanaannya dana desa yang diharapkan mampu untuk dapat memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki namun ternyata tidak dapat dilaksanakan karena masih tingginya nilai yang ada dimasyarakat terkait dengan tugas dari perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam sebuah kehidupan di sebuah komunitas. Berdasarkan pemaparan secara konseptual dan juga hasil laporan penelitian menunjukkan bahwa salah satu hal yang paling mendasar adanya isu gender dalam program dana desa adalah terkait dengan ekspektasi yang berlebih atas nilai gotong royong yang ada atas adanya kesempatan untuk memberikan yang sama antara laki-laki dan perempuan atau bahkan mendorong kesempatan kepada perempuan agar mampu meningkatkan kemauan perempuan dalam berpartisipasi. Kondisi kurangnya partisipasi perempuan disebutkan juga berdasarkan hasil penelitian tersebut diakibatkan karena adanya kendala diantaranya waktu, dana dan pengetahuan dari perempuan itu sendiri mengenai partisipasi dalam pembangunan (Monica & Fauziah, 2017). Oleh karena itu pada pelaksanaannya kondisi dana desa yang akhirnya diserahkan secara penuh melalui otonomi daerah pedesaan ternyata belum mampu untuk mendorong partisipasi perempuan pada proses pembangunan khususnya dalam wilayah pedesaan. Hal ini tentu mengakibatkan kecilnya peluang bagi perempuan untuk memberikan akses partisipasi bagi perempuan lainnya.

#### *Program Keluarga Harapan*

Selanjutnya program yang menjadi prioritas nasional adalah Program Keluarga Harapan. Program ini berjalan sejak tahun 2007 dan bertahan sampai dengan saat ini, adapun pelaksanaannya program ini hadir dengan semangat untuk meminimalisir isu gender khususnya pada kontribusi perempuan untuk upaya pengentasan kemiskinan. Hal

ini sejalan dengan situasi saat ini dimana upaya afirmatif dengan melibatkan perempuan sebagai aspek prioritas dalam pelaksanaan program menjadi kunci untuk melaksanakan percepatan kesetaraan gender. Tingginya populasi perempuan dan adanya budaya patriarki yang menggerogoti upaya untuk memaksimalkan peran perempuan perlu dijawab dengan program dari pemerintah terkait dengan kebijakan dan pembangunan (Suryahadi et al., 2013). Lebih lanjut kondisi ketidaksetaraan gender menyebabkan terjadinya kemiskinan secara kultural karena kondisi ini sangat relevan dengan salah satu dampak dari ketidaksetaraan gender yakni pemiskinan (*marginalisation*) (Khaerani, 2017). Secara teknis Program Keluarga Harapan merupakan program yang sangat kental dengan upaya untuk memberdayakan perempuan, oleh karena itu salah satu kebijakan yang paling terlihat adalah dengan memosisikan perempuan sebagai kelompok *central* dan menjadi juru kunci untuk pelaksanaan dari program, ini dilakukan seperti dengan perempuan sebagai sosok atau tokoh di keluarga yang memiliki hak untuk mengakses sumber bantuan dan memperoleh pelatihan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan menunjukkan bahwa sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Nainggolan, 2019b). Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetris dan tidak equal melalui retradisionalisasi gender (Nainggolan, 2019a). Kondisi ini tentu berlawanan dengan kondisi yang seharusnya, dimana pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak (Kusumaning, 2015). Hasil penelitian ini tentu menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya PKH sebagai program prioritas nasional dan mendukung *gender mainstreaming* mampu memberikan pembelajaran maksud dan tujuan sekaligus pelaksanaan dari *gender mainstreaming*. Karena dengan program ini memberikan peluang yang cukup kuat terlebih dengan adanya proses pendampingan oleh sumber daya manusia Program Keluarga Harapan yang selalu *up to date* dengan perkembangan ilmu pemberdayaan yang berbasis pada ilmu pekerjaan sosial, menjadi sebuah nilai tambah untuk mendorong bukan hanya perempuan dalam partisipasi program tersebut, namun juga

memberikan pemahaman kepada pihak laki-laki terkait pentingnya kolaborasi dan pembagian tugas yang proporsional dan seimbang untuk membuat sebuah keputusan dalam keluarga. Lebih lanjut Sebagai penerima manfaat dari program sepatutnya perempuan dapat dilibatkan juga dalam proses perencanaan (Arifin et al., 2021). Melalui cara ini maka perencanaan program ke depan dapat lebih terarah dengan *empirical evidence* data sehingga permasalahan atau tantangan yang berkembang dapat segera diselesaikan dan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya terkait dengan peran perempuan yang memiliki peran penting namun perlunya juga upaya dari pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman gender untuk lingkungan keluarga dari perempuan tersebut. Tugas yang ada di PKH tentu tidak menghilangkan peran dan tugas dari perempuan tersebut di lingkungan keluarganya. Hal ini karena pada akhirnya perempuan masih mengalami beban yang berlebih jika dibandingkan dengan laki-laki dalam lingkungan keluarga (Chotim & Jannah, 2021). Beban tugas di keluarga dan kerja yang dikenal dengan *double burden* ini kemudian memberikan dampak pada upaya perempuan dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal yang akhirnya kurang memuaskan. Perlunya pemahaman secara holistik baik secara substansial maupun operasional dalam pelaksanaan tindakan afirmatif yang relevan dengan isu gender sehingga hasil dari program sejalan dan bukan merugikan pihak perempuan.

## PENUTUP

Isu gender dalam proses pelaksanaan program pemerintah dalam upaya mengembangkan masyarakat masih belum terwujud dengan baik. pemanfaatan dana desa yang merupakan salah satu program prioritas nasional menyebutkan bahwa penggunaan nilai yang berlaku pada masyarakat ternyata tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendorong keseimbangan kontribusi antara perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut. bahkan kondisi yang lebih parah adalah penggunaan nilai yang telah berlaku di masyarakat memberikan efek yang kontradiktif dengan apa yang diharapkan, dimana perempuan ternyata semakin menjadi kelompok gender yang terpinggirkan dan kurang dapat memaksimalkan fungsinya di tengah masyarakat. Sedangkan dalam Program Keluarga Harapan dimana kondisi yang terlalu mengafirmasikan perempuan untuk mendorong pelaksanaan isu gender dalam program nasional, ternyata berdampak besar

pada kurangnya pemahaman atas pembagian proporsional yang tepat antara perempuan sebagai ibu dan laki-laki sebagai ayah, sehingga kesannya perempuan terlalu mengambil peran dalam setiap keputusan penting sehingga menimbulkan adanya bias gender dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang digambarkan di atas, maka diperlukannya sebuah upaya konkret dan serius khususnya untuk pelaksanaan program prioritas nasional yakni dana desa dan PKH untuk memaksimalkan proses pendampingan sehingga target yang diharapkan dapat terwujud. Proses pendampingan ini pun akan dapat maksimal apabila juga didukung oleh sumber daya yang kredibel dan tentunya dapat dimaksimalkan dengan proses pengembangan kapasitas secara berkala oleh Kementerian atau Lembaga yang menangani kedua program tersebut yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial. Proses pengembangan masyarakat dalam program-program pemerintah tersebut perlu juga diperhatikan untuk dapat memberikan pemahaman kepada setiap pihak agar dapat mengerti maksud dan cara mengimplementasikan nilai dari *gender mainstreaming*. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan implementasi isu gender pada kedua program prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review kebijakan yang disesuaikan dengan konsep pembangunan berbasis gender untuk mendorong proses pembangunan inklusif;
2. Melakukan penyesuaian kebijakan dan materi seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, modul dan seluruh materi yang relevan dengan pelaksanaan program dengan isu gender;
3. Memberikan program peningkatan kapasitas kepada pendamping yang berbasis gender;
4. Melakukan penyusunan instrumen terkait dengan gender pada tahap monitoring dan evaluasi pada kedua program tersebut dan dilakukan secara berkala;
5. Mendorong perguruan tinggi dan lembaga eksternal lainnya untuk melakukan penelitian kepada kedua program tersebut terkait dengan isu gender;
6. Melakukan publikasi hasil penelitian pada kedua program yang relevan dengan isu gender;

Melalui langkah-langkah ini diharapkan terjadi pembaharuan baik yang sifatnya internal maupun eksternal dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kedua program dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. P., Wulan, T. R., & Lestari, S. (2021). Perempuan dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan). *Jurnal Syntax Admiration*, 02(12).
- Chotim, E. E., & Jannah, N. A. Al. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis Dan Strategis Gender Dalam Perspektif Moser. *Jurnal Ilmu Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.957>
- Darmi, T. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18(1), 21–27.
- Fauziah, R., Mulyana, N., & Rharjo, S. Tri. (2015). Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender. Prosiding KS: Riset & PKM. *Gender. Prosiding KS: Riset & PKM*, 02(02), 147–300.
- Hasim, & Remiswai. (2009). *Community Development Berbasis Ekosistem*. Diadit Media.
- Ife, J. (2013). *Community Development*. Pustaka Pelajar.
- Indraswari. (2009). Perempuan dan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(02).
- Khaerani, S. N. (2017). Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Qawwām*, 11.
- Kusumaning, P. D. P. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(01).
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. (2017). *Modul Jilid 1 Kepemimpinan Perempuan di Desa*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 05(02).
- Mubarok, A. M., Barata, L. W., & Sundari, S. (2020). MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL: Studi Kasus Pembangunan Ekowisata di Desa Mandak. *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/welfare.2020.092-02>
- Nainggolan, T. (2019a). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan. *Socio Informa*, 05(01).
- Nainggolan, T. (2019b). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan. *Socio Informa*, 05(01).
- Nugraheny. (2019). *Jumlah Anggota DPR Perempuan Meningkat, Diimbangi dengan Kualitas?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/160400165/jumlah-anggota-dpr-perempuan-meningkat-diimbangi-dengan-kualitas-?page=all>
- Pusparisa, Y. (2019). *Proyeksi PBB: Kemiskinan Masih Terjadi Hingga 2030*. Katadata.Com.

- Putri, C. I., Darwis, R. S., & Taftazani, B. M. (2017). PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM DESA WISATA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14269>
- Rahmawati, D. N., Clarissa, A., & Dewi, S. A. T. (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender. In *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- SMERU. (2005). *Gender dan Kemiskinan*. The SMERU Research Institute.
- Statistik, B. P. (2018). *Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin 2015-2018*.
- Suryahadi, A., Isdijoso, W., Syukri, M., Usman, S., Yumna, A., Fillaili, R., Y.D.Utari, V., Hadiz, L., Adrianto, B., Mulyana, M., & Handoko, G. (2013). Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Seberapa Efektifkah Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender? Women's Empowerment In Poverty Reduction Programs: How Effective Is It In Addressing Gender Equality? In *The SMERU Research Institute*.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). *Psikologi Sosial*. Kencana.
- Texier, E. Le. (2006). Social capital and political participation in the barrio. *Revue Internationale Internationale*.
- World Bank. (2003). *Gender Equality and the Millenium Development Goals*.
- Wula, H. V. M., & Anggraini, T. (2022). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 201–208. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4309>